



---

# LAPORAN KEGIATAN TRIWULAN IV

---

BINMAS – SEKSI KEWASPADAAN DINI



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN  
BARAT TAHUN 2025

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga laporan Triwulan IV ini yang berjudul “Laporan Triwulan IV Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi T.A 2025” dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi di bidang Pembinaan Masyarakat selama Triwulan IV. Laporan Triwulan disusun sebagai bagian dari upaya menciptakan tertib administrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat kekurangan, baik dari segi isi maupun penyajian. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi perbaikan di masa mendatang.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan kegiatan ini dan penyusunan laporan Triwulan ini. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat serta menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan kualitas pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan di masa yang akan datang.

Kepala Seksi Kewaspadaan Dini,



HARYATMIN, S.IP.  
Penata Tk. I  
NIP. 19761005 199803 1 008

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	1
<b>DAFTAR ISI</b> .....	2
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	3
1.1 Latar Belakang .....	3
1.2 Maksud dan Tujuan.....	4
1.3 Lokasi dan Sasaran Kegiatan.....	4
1.4 Anggaran .....	5
<b>BAB II PELAKSANAAN</b> .....	6
2.1 Proses Pelaksanaan Kegiatan.....	6
2.2 Realisasi Keuangan.....	43
<b>BAB III HASIL DAN KENDALA PELAKSANAAN KEGIATAN</b> .....	45
3.1 Hasil Pelaksanaan Kegiatan.....	45
3.2 Kendala dan Solusi.....	46
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	47
<b>LAMPIRAN</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Penyusunan laporan pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi Triwulan IV Tahun 2025 secara prinsip merupakan perwujudan dari pertanggungjawaban Seksi Kewaspadaan Dini pada Bidang Pembinaan Masyarakat dalam menyelenggarakan kebijakan, tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat.

Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Seksi Kewaspadaan Dini Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Pasal 23 Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 tersebut di atas, yaitu :

Seksi Kewaspadaan Dini mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Kewaspadaan Dini serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas tersebut di atas, Seksi Deteksi Dini mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Kewaspadaan Dini;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang kewaspadaan dini;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang kewaspadaan dini;
- d. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kewaspadaan dini, deteksi dan cegah dini penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan;

- e. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kewaspadaan dini;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang kewaspadaan dini;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kewaspadaan dini; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain di bidang kewaspadaan dini yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

## **1.2 Maksud dan Tujuan**

### **a. Maksud**

Maksud penyusunan laporan ini adalah menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi Triwulan IV Tahun Anggaran 2025 dalam mendeteksi, mengidentifikasi, menilai, menganalisis, menafsirkan, dan memberikan informasi dalam rangka memberikan peringatan dini untuk mengantisipasi berbagai potensi pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, gangguan ketenteraman dan ketertiban umum, serta upaya dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat.

### **b. Tujuan**

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk menyediakan data tentang kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi Triwulan IV Tahun Anggaran 2025 untuk memantau capaian realisasi kinerja dan keuangan, akuntabilitas dan menilai keberhasilan organisasi dalam mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum di Kalimantan Barat.

## **1.3 Lokasi dan Sasaran Kegiatan**

- a. Lokasi Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi, yaitu di Provinsi Kalimantan Barat secara umum dan khususnya di Kota Pontianak, Kabupaten Kubu Raya dan Kabupaten Mempawah dan Kota Singkawang.

b. Sasaran Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi, yaitu :

- 1) Masyarakat, Pelaku Usaha dan Badan Usaha;
- 2) Aparatur Sipil Negara (ASN) di Organisasi Perangkat Daerah lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
- 3) Satuan Polisi Pamong Praja se-Kalimantan Barat.

#### 1.4 Anggaran

Terdapat perubahan pagu anggaran Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun Anggaran 2025 dari semula sebesar Rp. 606.721.400,- (enam ratus enam juta tujuh ratus dua puluh satu ribu empat ratus rupiah) menjadi sebesar Rp. 287.972.900,- (dua ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) atau terjadi pengurangan pagu sebesar 52,53 % (lima puluh dua koma lima puluh tiga persen) sebagaimana daftar tabel berikut :

#### PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2025

NO	KODE REKENING PROGRAM/KEGIATAN				URAIAN	ANGGARAN	Tolak ukur dan Target Kinerja	
							JUMLAH	%
1	2				3	4	5	6
I	1.05.	02			<b>Program Peningkatan Ketenterman dan Ketertiban Umum</b>			
	1.05.	02.1.	02		Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi			
	1.05.	02.1.	02	03	Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	287.972.900,-	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	4 Dok

## **BAB II PELAKSANAAN**

### **2.1 Proses Pelaksanaan Kegiatan**

Proses pelaksanaan kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi pada Triwulan IV ( Oktober - Desember) Tahun Anggaran 2025, yaitu :

#### **A. Melakukan Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Antisipasi Potensi Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Pada Aksi Unjuk Rasa dari Elemen Masyarakat, Berdasarkan :**

1. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Nomor. 300.1/ 1444 /SATPOL.PP-B tanggal 3 Oktober 2025, dilaksanakan pada hari Jum'at, tanggal 3 Oktober 2025 Dalam Rangka Deteksi Dini Antisipasi Potensi Gangguan Trantibum pada Kegiatan Unjuk Rasa Aksi Badko HMI di Halaman Mapolda Kalbar Provinsi Kalimantan Barat.

#### **Hasil Kegiatan :**

- Pelaksanaan kegiatan dipimpin oleh Plt Kepala Seksi Kewaspadaan Dini Haryatmin, S.IP
- Melakukan koordinasi dengan semua tim Pada Kegiatan Kegiatan Unjuk Rasa Aksi Badko HMI Di Halaman Polda Kalbar Provinsi Kalimantan Barat.

Pada hari jum'at dari gerakan HMI melakukan Unjuk Rasa berkumpul di markas BEM Untan masa bergerak dari tikum jam 15:11 menggunakan motor dan dikawal dari tim PJR Polantas menuju titik lokasi orasi di Mapolda Kalbar untuk masa berjumlah ± 80 orang.

Massa bermaksud unjuk rasa demi kebaikan kalbar dikarenakan pemimpin atau gubernur yang terjerat kasus sehingga bisa menghambat program kerja dikarenakan fokus nya terbagi untuk menyelesaikan kasus sehingga banyak program yang tidak jalan, masa berasumsi lemah nya hukum di kalbar sehingga status hukum gubernur menjadi menggantung. Mereka menuntut kepolisian untuk mengusut tuntas kasus Gubernur demi kemajuan kalimantan barat, tindakan represif aparat yang menginjak kepala teman mereka selama satu bulan juga

dipertanyakan terkait status hukum yang belum jelas tindakan yg dilakukan hingga sekarang. Masa yang sebelumnya berorasi ditrotoar jalan di depan kantor Mapolda di jam 15:55 masa bergerak masuk berorasi di lapangan jananuraga bermaksud untuk meminta diskusi dengan Kapolda Bapak Pipit Rismanto di halaman Mapolda masa orasi ditemui oleh perwakilan dari Mapolda AKBP Rensa S. Aktadivya, S.H., S.I.K., M.H. (Kasubdit 3 Krimsub Polda Kalbar) dikarenakan Bapak Kapolda berhalangan hadir.

2. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Nomor. 300.1/ 1456 /SATPOL.PP-B tanggal 7 Oktober 2025, dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 7 Oktober 2025 Dalam Rangka Deteksi Dini Antisipasi Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Unjuk Rasa Aliansi Organda Kalbar 14 Kabupaten Kota Di Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Barat.

**Hasil Kegiatan :**

- Pelaksanaan kegiatan dipimpin oleh Plt Kepala Seksi Kewaspadaan Dini Haryatmin, S.IP
- Melakukan koordinasi dengan semua tim Pada Kegiatan Unjuk Rasa Aliansi Organda Kalbar 14 Kabupaten Kota Di Kantor Dprd Provinsi Kalimantan Barat.

Mahasiswa dari 14 kabupaten/kota di Kalimantan Barat menggelar aksi damai di Gedung DPRD Provinsi Kalbar, Selasa (7/10). Aksi yang digelar sekitar pukul 15.00 WIB di halaman gedung legislatif tersebut berlangsung tertib. Para mahasiswa akhirnya diterima di Ruang Meranti untuk menyampaikan tuntutan secara resmi.

Aksi ini digelar oleh Aliansi Organisasi Daerah (Organda) Kalbar sebagai bentuk tanggung jawab moral mahasiswa terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah provinsi. Koordinator aksi, Syarif Falmuliandri Tri Saris, menegaskan bahwa mahasiswa hadir bukan hanya sebagai penonton, tetapi sebagai bagian dari masyarakat yang peduli terhadap masa depan Kalbar.

Kami datang untuk mengawal pemerataan pembangunan dan keadilan bagi seluruh daerah di Kalimantan Barat," ujar Syarif dalam pernyataannya. Aliansi mahasiswa ini menyampaikan delapan poin tuntutan utama kepada pemerintah provinsi dan DPRD Kalbar, yang mencakup isu keuangan daerah, infrastruktur, lingkungan hidup, hingga konflik agraria.

Pertama, DPRD Provinsi Kalbar diminta bersikap tegas menolak rencana pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) pada 2026 yang dianggap memperlambat pemerataan pembangunan di Kalbar. Kedua, pemerintah diminta meningkatkan persentase Dana Bagi Hasil (DBH) untuk Kalbar dan pengawasan menyeluruh terhadap anggaran pembangunan jalan harus segera dilakukan. Selain itu, mereka juga meminta adanya transparansi informasi publik sesuai UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Tuntutan lainnya adalah percepatan penyelesaian masalah infrastruktur di seluruh kabupaten/kota. Terakhir, mereka meminta penyelesaian konflik agraria secara adil dan transparan, khususnya antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit, HTI, dan tambang.

Pemerintah terhadap berbagai persoalan daerah masih lamban dan minim pengawasan. Mereka menegaskan bahwa tuntutan rakyat adalah "harga mati" dan mengingatkan bahwa kedaulatan sejati berada di tangan rakyat, bukan segelintir elite. Sejarah sedang ditulis. Kalimantan Barat kini menjadi episentrum pengingat bahwa pemerintahan harus berpihak pada rakyat," tegas Syarif. Aliansi Organda Kalbar berharap delapan poin tuntutan ini segera ditindaklanjuti dengan langkah konkret, demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Kalbar

3. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Nomor. 300.1/ 1504 /SATPOL.PP-B tanggal 14 Oktober 2025, dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 15 Oktober 2025 Dalam Rangka Deteksi Dini Antisipasi Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Aksi Unjuk Rasa BEM Politeknik Negeri Pontianak Provinsi Kalimantan Barat Di Kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Barat.

#### **Hasil Kegiatan :**

- Pelaksanaan kegiatan dipimpin oleh Plt Kepala Seksi Kewaspadaan Dini Haryatmin, S.IP.
- Melakukan koordinasi dengan semua tim Pada Kegiatan Unjuk Rasa di Kantor Kajati Pontianak Provinsi Kalimantan Barat.

Ratusan massa dari Barisan Pemuda Melayu (BPM) Kalimantan Barat menggelar aksi unjuk rasa di dua lokasi berbeda, yakni Polda Kalbar dan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, Aksi ini menyoroti dugaan lambannya penanganan kasus peredaran oli diduga palsu yang melibatkan tersangka bernama Edy Chow. Sebanyak 567 peserta aksi

turun ke jalan membawa tiga tuntutan utama. Ketua Umum BPM Kalbar, Gusti Edi, dalam orasinya menyebutkan, tuntutan itu meliputi penangkapan terhadap "Cukong Oil" Edy Chow yang telah ditetapkan sebagai tersangka namun belum ditahan, penindakan terhadap "Cukong Tambang" yang merusak kawasan Cagar Alam Bumi Khatulistiwa, serta penindakan terhadap oknum aparat penegak hukum yang diduga melakukan pembiaran. Usai berorasi di Mapolda Kalbar, massa bergerak menuju Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat untuk mendesak Kejati segera memproses kasus oli palsu tersebut. Kasus itu diketahui telah dilimpahkan dari penyidik Polda Kalbar ke Kejati Kalbar untuk tahap penuntutan.

Di halaman kantor Kejati, aksi BPM Kalbar berlangsung dengan simbolis yang menarik perhatian publik. Ketua Umum BPM Kalbar, Gusti Edi, mengalungkan bungkus Tolak Angin kepada salah satu pejabat Kejati Kalbar. Tindakan itu memiliki makna simbolik agar pihak kejaksaan tidak "masuk angin" dalam menangani kasus dugaan peredaran oli palsu dan sejumlah kasus besar lainnya di Kalbar. "Tolak angin supaya kasus oil tak masuk angin," tegas Gusti Edi.

Demikian Berdasarkan hasil penyidikan, Edy Chow ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menjadi pembuat sekaligus pengedar oli palsu dari berbagai merek ternama di wilayah Kalimantan Barat. Oli palsu tersebut diduga diperolehnya dari tiga orang berinisial WG, CEH, dan FO, yang disebut memiliki hubungan dengan pejabat penting di tingkat pusat. Edy Chow juga diketahui merupakan anak sulung dari FS, seorang pengusaha yang dikabarkan dekat dengan pejabat tinggi di tingkat provinsi. Kedekatan ini disebut-sebut menjadi salah satu alasan publik mendesak Kejati Kalbar agar bertindak profesional dan transparan. Gusti Edi menilai, kasus dugaan pemalsuan oli ini termasuk kejahatan berlapis, karena melanggar sejumlah ketentuan hukum yang diatur dalam beberapa undang-undang sekaligus. Berdasarkan hasil telaah hukum, BPM Kalbar menyebut daftar pasal yang menjerat tersangka: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pasal 100 ayat (1) dan (2) melarang penggunaan merek terdaftar tanpa izin resmi.

Ancaman hukuman: penjara maksimal 5 tahun dan denda hingga Rp2 miliar. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 62 ayat (1) melarang produksi atau penjualan barang yang menyesatkan serta merugikan konsumen.

4. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Nomor. 300.1/ 1511 /SATPOL.PP-B tanggal 15 Oktober 2025, dilaksanakan pada hari Rabu, 16 Oktober 2025 Dalam Rangka Deteksi Dini Antisipasi Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Aksi Unjuk Rasa Para Supir Truk Exspidisi Pontiak Di Tugu Alianyang Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat.

**Hasil Kegiatan :**

- Pelaksanaan kegiatan dipimpin oleh Plt Kepala Seksi Kewaspadaan Dini Haryatmin, S.IP.
- Melakukan koordinasi dengan semua tim Pada Kegiatan Aksi Unjuk Rasa Para Supir Truk Exspidisi Pontiak Di Tugu Alianyang Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat.

**Hasil Temuan di Lapangan**

Ratusan sopir truk yang tergabung dalam Persatuan Driver Truk Kalimantan Barat menggelar aksi damai di Bundaran Tugu Alianyang, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Kamis (16/10/2025) pagi. Dalam aksi tersebut, para sopir truk membawa sejumlah spanduk bertuliskan keluhan dan harapan mereka terhadap pemerintah. Salah satu spanduk bertuliskan:

"BBM Subsidi → Truk Logistik X | BBM Subsidi → Pelangsir  | Tolong Kami Sopir Kalbar Pak Presiden."

Mereka menuntut agar Pemerintah Provinsi Kalbar bersama Pertamina menertibkan distribusi bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis solar yang dinilai tidak tepat sasaran.koordinator lapangan aksi, Muhammad Ali alias Daeng Ali dan Mulyono, menyampaikan bahwa hampir seluruh SPBU di wilayah Kalbar kini diduga dikuasai oleh para pelangsir, sehingga sopir truk kesulitan mendapatkan solar subsidi.Kami meminta pemerintah bertindak tegas terhadap SPBU nakal yang menyalahgunakan penyaluran solar. Kami sopir bukan mau bikin gaduh, tapi mencari keadilan agar BBM subsidi benar-benar sampai ke yang berhak," tegas Muhammad Ali di sela aksi. Usai aksi di Bundaran Alianyang, perwakilan sopir bersama para pejabat penting mengikuti audiensi di Kafe Kiss, Jalan Trans Kalimantan, Kecamatan Sungai Ambawang.Audiensi tersebut dihadiri Wakil Gubernur Kalbar Krisantus Kurniawan, Sekda Provinsi Harisson, Dirintelkam Polda Kalbar Kombes Pol Munizar, Dirlantas Polda Kalbar Kombes Pol Valentinus Asmoro, dan sejumlah pejabat dari Pertamina Patra Niaga serta instansi terkait.

Dalam forum itu, perwakilan sopir Toni menegaskan bahwa mereka memberi waktu kepada pemerintah untuk bertindak tegas. Kalau tidak ada tindakan nyata, kami siap turun lagi ke Kantor Gubernur membawa truk dan menutup jalan di depan sana," tegasnya di hadapan pejabat provinsi. sementara Daeng Ali menyoroti lemahnya pengawasan terhadap SPBU. Ia meminta pemerintah mewajibkan seluruh SPBU mengaktifkan CCTV dan menyesuaikan sistem barcode dengan nomor polisi kendaraan yang terdaftar. CCTV itu bukti transparansi. Kalau ada penyimpangan, bisa langsung dilihat. Kami juga minta SPBU yang melanggar diberi sanksi tegas," ujarnya. Menanggapi keluhan sopir, Sales Area Manager Kalbar PT Pertamina Patra Niaga, Aris Ilmi, menjelaskan bahwa Pertamina sudah menjatuhkan sanksi berupa blacklist terhadap dua SPBU di wilayah Kalbar yang terbukti menyalurkan BBM tidak sesuai ketentuan. Kuota dari dua SPBU tersebut sudah kami alihkan ke SPBU terdekat. Kami juga membuka ruang pengaduan melalui Call Center Pertamina agar masyarakat bisa langsung melapor, Aris Ilmi pun meminta dukungan dari para sopir untuk menyerahkan data nomor polisi kendaraan ekspedisi agar dapat dibedakan dari kendaraan pelangir saat pengisian BBM.

Wakil Gubernur Kalbar Krisantus Kurniawan menyampaikan bahwa pemerintah provinsi memberikan waktu satu minggu kepada Pertamina untuk menindaklanjuti seluruh keluhan sopir truk. Kami akan pantau langsung pelaksanaannya. Aparat dan instansi terkait juga kami minta ikut mengawasi agar distribusi BBM subsidi tepat sasaran, Krisantus juga mengimbau agar para sopir truk menggunakan kendaraan berpelat nomor Kalbar. "Kendaraan luar daerah silakan segera mutasi. Itu bentuk kontribusi nyata bagi daerah," tambahnya. Wagub memastikan bahwa Pemprov Kalbar akan menindaklanjuti persoalan harga eceran tertinggi (HET) dan takaran BBM di tingkat pengecer melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi. setelah mendengar tanggapan dari pemerintah dan Pertamina, massa aksi akhirnya menerima dan menyerahkan dokumen tuntutan resmi kepada Pemerintah Provinsi Kalbar sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan Instruksi Gubernur Kalbar terkait penertiban SPBU.

5. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Nomor. 300.1/ 1526 /SATPOL.PP-B tanggal 17 Oktober 2025, dilaksanakan pada hari Kamis, 17 Oktober 2025 Dalam Rangka Deteksi Dini Antisipasi Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Aksi Unjuk Rasa BEM Politeknik Negeri Pontianak Provinsi Kalimantan Barat Di Kantor Gubernur.

**Hasil Kegiatan :**

- Pelaksanaan kegiatan dipimpin oleh Plt Kepala Seksi Kewaspadaan Dini Haryatmin, S.IP.
- Melakukan koordinasi dengan semua tim Pada Kegiatan Unjuk Rasa Aksi Serikat Petani Indonesia Provinsi Kalimantan Barat Di Kantor Gubernur.

Hasil Temuan di Lapangan

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menerima audiensi dari perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Se-Indonesia Kalbar yang menyampaikan aspirasi terkait pengelolaan sumber daya alam, kesejahteraan masyarakat, serta peran pemuda dalam ekonomi kreatif dan pembangunan daerah. Sekda Kalbar, Harisson, menyampaikan apresiasi atas kepedulian mahasiswa terhadap kemajuan Kalimantan Barat dan menegaskan bahwa seluruh aspirasi yang disampaikan akan menjadi perhatian serius pemerintah provinsi.

Pemprov Kalbar terus berkomitmen membuka ruang dialog dan kolaborasi dengan generasi muda dalam mewujudkan Kalimantan Barat yang maju, berdaya saing, dan berkelanjutan.

6. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Nomor. 300.1/ 1663 /SATPOL.PP-B tanggal 7 November 2025, dilaksanakan pada hari Jum'at, tanggal 7 November 2025 Dalam Rangka Deteksi Dini Antisipasi Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Aksi Aliansi Solmadapar di Gedung DPRD Provinsi Kalimantan Barat.

**Hasil Kegiatan :**

- Pelaksanaan kegiatan dipimpin oleh Plt Kepala Seksi Kewaspadaan Dini Haryatmin, S.IP.
- Waktu pelaksanaan tanggal 7 November 2025 di mulai pukul 14.00 WIB bertempat di Gedung DPRD Provinsi Kalimantan Barat.

Hasil Temuan di Lapangan

Sekitar belasan mahasiswa yang tergabung dalam organisasi Solidaritas Mahasiswa Pengemban Amanat Rakyat (Solmadapar) mendatangi gedung DPRD Kalimantan Barat pada Jumat (7/10) sore. Mereka tiba sekitar pukul 16.00 WIB, sedikit terlambat dari jadwal semula pukul 15.00 WIB, dan langsung disambut pengamanan ketat dari aparat kepolisian. Kedatangan para mahasiswa ini bukan untuk berunjuk rasa secara anarkis, melainkan untuk berdiskusi dan menyampaikan aspirasi mengenai sejumlah persoalan yang tengah ramai diperbincangkan secara nasional, salah satunya terkait pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat. Kami datang ingin berdiskusi dengan anggota DPRD Kalbar soal dampak pemotongan TKD terhadap Kalimantan Barat.

Apa implikasinya bagi pembangunan dan pelayanan publik di daerah kami?" ujar salah satu perwakilan mahasiswa. Selain isu TKD, para mahasiswa juga menyinggung beberapa persoalan lain yang mereka nilai penting untuk dikaji bersama para wakil rakyat, termasuk pemerataan pembangunan dan perhatian terhadap wilayah perbatasan yang masih tertinggal. Namun, setibanya di gedung DPRD, para mahasiswa mendapati bahwa seluruh anggota DPRD Kalbar tengah berada di luar daerah, mengikuti kegiatan kedinasan di Jakarta. Hal ini membuat mereka hanya bisa menyampaikan niat berdiskusi kepada staf sekretariat dewan yang bertugas di kantor. Kami tidak datang untuk marah-marah atau memaksa. Kami hanya ingin duduk bersama, berdiskusi tentang kondisi Kalimantan Barat hari ini," kata salah satu peserta aksi dengan nada kecewa. Meski begitu, para mahasiswa tetap menyampaikan aspirasi mereka secara tertib dibawah pengamanan aparat kepolisian.

Aksi damai ini menunjukkan kepedulian kalangan mahasiswa terhadap kebijakan nasional yang berdampak langsung ke daerah. Menurut mereka, pemotongan dana transfer daerah bisa mempengaruhi pelayanan publik, terutama di sektor pendidikan, infrastruktur, dan kesejahteraan masyarakat di Kalbar. Mereka berharap, para wakil rakyat di DPRD Kalbar tidak tinggal diam dan mau membuka ruang dialog

dengan generasi muda, agar kebijakan pemerintah pusat bisa dikawal dengan baik dan tetap berpihak pada kepentingan daerah. "Kami tidak menolak kebijakan pusat, tapi kami ingin transparansi dan kejelasan. Kalbar jangan sampai dirugikan," tegas salah satu orator.

7. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Nomor. 300.1/ 1734 /SATPOL.PP-B tanggal 19 November 2025, dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 19 November 2025 Dalam Rangka Deteksi Dini Antisipasi Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Aksi Demo Organisasi PMII Di Kajati Pontianak Provinsi Kalimantan Barat.

#### **Hasil Kegiatan :**

- Pelaksanaan kegiatan dipimpin oleh Plt Kepala Seksi Kewaspadaan Dini Haryatmin, S.IP.
- Waktu pelaksanaan tanggal 19 November 2025 di mulai pukul 14.00 WIB bertempat di Depan Gedung Kajati Provinsi Kalimantan Barat.

#### Hasil Temuan di Lapangan

Puluhan mahasiswa yang tergabung pada organisasi PMII menggelar aksi unjuk rasa atau demonstrasi di depan Gedung Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat (Kejati Kalbar), Rabu (19/11) Siang. Mereka menuntut agar Kejati Kalbar ambil alih penanganan kasus BP2TD dan jalan di Mempawah. Demonstrasi mahasiswa tersebut diterima oleh Pihak Kajati Kalbar yang diwakili oleh Koordinator Pada Kejati Kalbar, Hendri Siswanto, S.H, M.H., didampingi Kasi Penkum Kejati Kalbar I Wayan Gedin Arianta.

PMII menilai bahwa penanganan kasus BP2TD dan Jalan di Kabupaten Mempawah tahun 2015 yang ditandatangani KPK sampai saat ini tidak ada kejelasannya, sehingga mereka mendesak Pihak Kejati Kalbar untuk ambil alih penanganan kasus korupsi tersebut. Setelah dialog, mahasiswa menyampaikan membacakan tuntutan nya,

- Menolak figur pemimpin yang terindikasi Korupsi memimpin Kalimantan Barat,

- Mendesak segera Kejati Kalbar untuk menuntaskan kasus-kasus hukum yang masih mangkrak serta memastikan proses hukum secara transparan, profesional dan bebas dari intervensi pihak manapun.
  - Menuntut Kejati Kalbar agar berperan aktif dan ikut serta menangani kasus-kasus korupsi yang ada di Kalbar khususnya kasus BP2TD Mempawah yang sampai saat ini tidak ada kejelasan.
  - Menuntut Kejati Kalbar memberikan kejelasan terkait proses hukum BP2TD dan jalan di Mempawah agar tidak liar di media sosial.
  - Mendesak Kejati Kalbar untuk segera kejelasan status hukum Gubernur Kalbar pada kasus BP2TD dan jalan di Mempawah.
8. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Nomor. 300.1/ 1735 /SATPOL.PP-B tanggal 19 November 2025, dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 20 November 2025 Dalam Rangka Deteksi Dini Antisipasi Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Aksi Forda Kalbar ,Bem Seka Kalbar Dan Bemsi Kalbar Di Gedung DPRD Untuk Menggugat Provinsi Kalimantan Barat.

**Hasil Kegiatan :**

- Pelaksanaan kegiatan dipimpin oleh Plt Kepala Seksi Kewaspadaan Dini Haryatmin, S.IP.
- Waktu pelaksanaan tanggal 20 November 2025 di mulai pukul 14.00 WIB bertempat di Gedung DPRD Provinsi Kalimantan Barat.

**Hasil Temuan di Lapangan**

Mahasiswa dan mahasiswi yang tergabung dalam BEM SI, BEM SEKA Kalbar, serta Federasi Organisasi Mahasiswa Daerah Kalimantan Barat menggelar aksi damai bertajuk "Kalbar Menggugat" pada Kamis sore 20 November 2025 untuk menyuarakan berbagai tuntutan daerah. Massa aksi mulai berkumpul di Kampus Universitas Muhammadiyah Pontianak sejak pukul 15.00 WIB sebelum melakukan long march menuju Gedung DPRD Provinsi Kalimantan Barat. Aksi ini membawa empat tuntutan utama, yaitu pembenahan infrastruktur di Kalimantan

Barat, penyempurnaan KUHAP, percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset, serta penegakan UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Setibanya di Gedung DPRD Provinsi, para peserta aksi bergantian menyampaikan keluhan kesah dan persoalan yang mereka nilai sudah lama dirasakan masyarakat di 14 kabupaten/kota se-Kalimantan Barat. Namun situasi sempat memanas ketika pihak DPRD tidak memberikan izin bagi seluruh peserta aksi untuk masuk ke ruang paripurna. Meski begitu, ketegangan dapat diredam dan aksi tetap berlangsung kondusif. Korlap aksi, Syarif Falmu, menegaskan bahwa aksi ini lahir dari kebutuhan mendesak masyarakat daerah untuk didengar secara langsung oleh para wakil rakyat.

"Kami mewakili keluhan kesah dari 14 kabupaten/kota. Kami berharap Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat mendengarkan aspirasi ini. Ini bukan aspirasi nasional, bukan pula isu yang dibuat-buat. Ini adalah permasalahan nyata yang kami hadapi di daerah. Setidaknya seluruh anggota dewan dari tiap dapil hadir untuk mendengar," ujarnya di tengah aksi.

la menambahkan, apabila aspirasi ini tidak ditindaklanjuti, pihaknya siap melanjutkan perjuangan.

"Jika aspirasi ini belum didengar, kami akan terus mengawal. Bila perlu ada aksi jilid 2, 3, dan seterusnya," Hingga aksi berakhir, situasi tetap terkendali. Para mahasiswa berharap tuntutan mereka dapat segera ditanggapi dan menjadi perhatian serius DPRD Provinsi Kalimantan Barat demi peningkatan pembangunan daerah dan perlindungan hukum bagi masyarakat.

Pada Kegiatan Aksi Forda Kalbar ,Bem Seka Kalbar Dan Bemsi Kalbar Di Gedung DPRD Untuk Menggugat Provinsi Kalimantan Barat tidak ada ditemukan potensi gangguan trantibun Selama Kegiatan Tersebut.

9. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Nomor. 300.1/ 1751 /SATPOL.PP-B tanggal 21 November 2025, dilaksanakan pada hari Jum'at, tanggal 21 November 2025 Dalam Rangka Deteksi Dini Antisipasi Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Aksi Forda Kalbar ,Bem Seka Kalbar Dan Bemsi Kalbar Di Gedung DPRD Untuk Menggugat Provinsi Kalimantan Barat.

**Hasil Kegiatan :**

- Pelaksanaan kegiatan dipimpin oleh Plt Kepala Seksi Kewaspadaan Dini Haryatmin, S.IP.
- Waktu pelaksanaan tanggal 21 November 2025 di mulai pukul 14.00 WIB bertempat di Gedung DPRD Provinsi Kalimantan Barat.

**Hasil Temuan di Lapangan**

Hujan deras tidak menghalangi hampir seratus mahasiswa dari berbagai organisasi kampus di Kalimantan Barat untuk menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Kalbar, Jumat (21/11) sekitar pukul 16.10 WIB hingga menjelang magrib.

Massa berasal dari BEM SI Korwil Kalbar, Federasi Organisasi Mahasiswa Daerah (FOMDA), BEM se-Kalbar, hingga BEM Nusantara. Ini merupakan hari kedua mereka mendatangi kantor legislatif untuk menyampaikan aspirasi. Dalam aksinya, mahasiswa menyoroti sejumlah persoalan besar di tingkat nasional dan di Kalimantan Barat, mulai dari Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) di pusat, hingga masalah krusial di Kalbar vana disebut. Situasi aksi sempat memanas ketika peserta membakar ban bekas sehingga asap hitam membumbung tinggi di tengah hujan. Mereka terus mendesak bertemu langsung dengan pimpinan DPRD Kalbar untuk berdialog di ruang paripurna.

Beberapa anggota DPRD Kalbar akhirnya turun menemui massa, di antaranya Agus Sudarmansyah dan M. Darwis dari Fraksi PDI Perjuangan, Rizky A.Wahab alias Agam dari PKB, serta Wahyudi dari Partai Demokrat. Mereka menghampiri mahasiswa yang sedang menyampaikan aspirasi meski hujan masih mengguyur. Namun

pertemuan itu berlangsung tegang. Mahasiswa yang berada di barisan depan mencoba merangsek masuk ke area dalam gedung dan mendorong anggota dewan yang berdiri di hadapan mereka. Aksi dorong ini sempat membuat suasana panas hingga anggota DPRD memilih mundur untuk menghindari eskalasi.

Ia juga menyebutkan faktor keamanan sebagai alasan lainnya. "Kita juga tidak berani jamin kondisi kondusif. Jadi memang tidak memungkinkan. Untuk memastikan menerima peserta aksi di ruang paripurna, anggota DPRD Kalbar juga menelpon salah satu pimpinan DPRD Kalbar. Pimpinan awalnya belum menyetujui karena terkait kondusifitas di ruang rapat. Namun menjelang magrib terjadi dialog kembali agar peserta aksi dapat diterima untuk berdialog.

Pada Kegiatan Aksi Forda Kalbar ,Bem Seka Kalbar Dan Bemsi Kalbar Di Gedung DPRD Untuk Menggugat Provinsi Kalimantan Barat tidak ada ditemukan potensi gangguan trantibun Selama Kegiatan Tersebut.

10. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Nomor. 300.1/ 1779 /SATPOL.PP-B tanggal 26 November 2025, dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 26 November 2025 Dalam Rangka Deteksi Dini Antisipasi Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Aksi Forda Kalbar ,Bem Seka Kalbar Dan Bemsi Kalbar Di Gedung DPRD Untuk Menggugat Provinsi Kalimantan Barat.

#### **Hasil Kegiatan :**

- Pelaksanaan kegiatan dipimpin oleh Plt Kepala Seksi Kewaspadaan Dini Haryatmin, S.IP.
- Waktu pelaksanaan tanggal 26 November 2025 di mulai pukul 14.00 WIB bertempat di Gedung DPRD Provinsi Kalimantan Barat.

#### **Hasil Temuan di Lapangan**

Hampir seratus mahasiswa yang tergabung dalam BEM SI Korwil Kalbar, Federasi Organisasi Mahasiswa Daerah (FOMDA), BEM se-Kalbar, hingga BEM Nusantara kembali mendatangi Gedung DPRD

Provinsi Kalimantan Barat, Rabu (26/11). Kedatangan mereka merupakan yang ketiga kalinya dalam sepekan terakhir untuk mendesak pertemuan langsung dengan pimpinan DPRD Kalbar dan pimpinan sejumlah SKPD. Dalam aksinya, mahasiswa mengangkat berbagai persoalan besar, mulai dari isu nasional seperti Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), hingga berbagai masalah krusial di Kalimantan Barat yang dinilai merugikan masyarakat. Isu infrastruktur, kesehatan, pendidikan hingga permasalahan sosial-budaya kembali menjadi sorotan utama. Seperti aksi sebelumnya, demonstrasi kali ini juga berlangsung panas. Para peserta aksi kembali mendesak untuk ketemu pimpinan DPRD Kalbar dan pimpinan sejumlah SKPD guna berdialog langsung dengan pimpinan dewan. Ketegangan mencuat sebelum akhirnya aparat kepolisian menenangkan situasi dan proses dialog kembali dibuka.

Untuk aksi kali ini, Rabu (26/11) para peserta aksi kembali memaparkan persoalan Kalbar. Hanya kali ini, jumlah anggota DPRD Kalbar yang hadir lebih banyak dibandingkan, hari sebelumnya. Pun demikian, sejumlah kepala SKPD seperti Kadis PUPR Kalbar dan lainnya juga bersiap menerima aspirasi mahasiswa. Sama seperti sebelumnya, peserta aksi memaparkan sejumlah persoalan mendesak yang mereka nilai perlu tindakan segera. Infrastruktur jalan yang tidak merata dan banyak yang rusak, terutama akibat tingginya mobilitas kendaraan tambang dan angkutan sawit. Keselamatan lalu lintas, khususnya terkait angkutan besar seperti truk kontainer 20 feet dan 40 feet yang masih melintas di luar jam operasional dan menyebabkan kecelakaan fatal.

Pembahasan RKUHP, yang menurut mahasiswa masih memiliki sejumlah pasal bermasalah. Tuntutan reformasi Polri, yang selalu menjadi agenda penyampaian mahasiswa. Ada juga maraknya peredaran narkoba di Kalbar, yang dinilai semakin mengancam generasi muda. Selain itu, pemangkasan anggaran infrastruktur di daerah, yang berdampak pada layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan juga disampaikan.

Mahasiswa dari daerah mengeluhkan bahwa pemangkasan anggaran membuat pembangunan dasar semakin tertinggal. "Bagaimana pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur bisa meningkat kalau anggarannya justru dikurangi?" ujar salah satu peserta aksi. Pada Kegiatan Aksi Forda Kalbar ,Bem Seka Kalbar Dan Bemsi Kalbar Di Gedung DPRD Untuk Menggugat Provinsi Kalimantan Barat tidak ada ditemukan potensi gangguan trantibun Selama Kegiatan Tersebut.

**B. Melakukan Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Antisipasi Potensi Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Pada Kegiatan Yang Dilaksanakan Di Lokasi Atau Aset Milik Provinsi Kalimantan Barat, Berdasarkan :**

1. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Nomor. 300.1/ 1441 /SATPOL.PP-B tanggal 3 Oktober 2025, dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 6 Oktober 2025 Dalam Rangka Deteksi Dini Antisipasi Potensi Gangguan Trantibum Pada Perayaan Maulid Nabi Muhammad Saw di Masjid AN NAIM di Kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025.

**Hasil Kegiatan :**

- Pelaksanaan kegiatan dipimpin oleh Plt Kepala Seksi Kewaspadaan Dini Haryatmin, S.IP.
- Melakukan koordinasi dengan semua tim Satpol PP, dan Tim Pendakwah, Pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat.

Hasil temuan di lapangan

Suasana penuh kehangatan menyelimuti Masjid An-Na'im, Kantor Gubernur Kalbar, saat Ustadz Abdul Somad (UAS) hadir memberikan tausiyah dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW bersama Gubernur Kalbar, Ria Norsan. Dengan pesan penuh makna, UAS mengajak umat untuk memperkuat iman, memperbanyak syukur, serta menjaga ukhuwah dan kebersamaan.

Sementara Gubernur Ria Norsan berharap, peringatan Maulid menjadi momentum meneladani akhlak Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Dari Masjid An-Na'im, cahaya Maulid memancar, menebar kedamaian dan keberkahan bagi seluruh masyarakat Kalimantan Barat.

Kegiatan Pada Perayaan Maulid Nabi Muhammad Saw di Masjid AN NAIM di Kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 tidak ditemukan potensi gangguan trantibum selama kegiatan berlangsung.

2. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Nomor. 300.1/ 1790 /SATPOL.PP-B tanggal 27 November 2025, dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 27 November 2025 Dalam Rangka Deteksi Dini Antisipasi Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Rapat Paripurna Pendapat Akhir Faksi- Faksi DPRD dan Penetapan Keputusan DPRD anggaran tahun 2026 di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025.

#### **Hasil Kegiatan :**

- Pelaksanaan kegiatan dipimpin oleh Plt Kepala Seksi Kewaspadaan Dini Haryatmin, S.IP.
- Waktu pelaksanaan tanggal 27 November 2025 di mulai pukul 08.00 WIB sampai selesai tempat di Gedung DPRD Provinsi Kalbar.

#### **Hasil Temuan di Lapangan**

Gubernur Kalbar, Ria Norsan, bersama DPRD Kalbar resmi menetapkan APBD Tahun Anggaran 2026. Penetapan ini menjadi langkah strategis untuk memastikan pembangunan berjalan efektif, terarah, dan memberi dampak nyata bagi Masyarakat.

APBD 2026 disusun melalui kerja sama solid antara Pemprov dan DPRD, mulai dari pembahasan KUA-PPAS hingga finalisasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Tahun ini, Pendapatan Daerah ditargetkan Rp 5,97 triliun dan Belanja Daerah sebesar Rp 6,22 triliun, dengan pembiayaan yang bersumber dari estimasi SILPA 2025.

Gubernur Ria Norsan mengapresiasi masukan seluruh fraksi dan menegaskan pentingnya percepatan pelaksanaan program oleh SKPD, serta penguatan pengawasan agar setiap target APBD 2026 tercapai

secara optimal. Beliau juga menekankan bahwa kolaborasi Eksekutif dan Legislatif adalah kunci untuk mewujudkan pembangunan yang benar-benar meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kalbar.

Pada Kegiatan Rapat Paripurna Pendapat Akhir Faksi- Faksi DPRD dan Penetapan Keputusan DPRD anggaran tahun 2026 di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 tidak ditemukan potensi gangguan trantibum selama kegiatan berlangsung.

3. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Nomor. 300.1/ 1819 /SATPOL.PP-B tanggal 2 Desember 2025, dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 2 Desember 2025 Dalam Rangka Deteksi Dini Antisipasi Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Gubernur Penguatan Implementasi Manajemen Talenta ASN pada Pemerintah Daerah se-Kalimantan Barat dan Penandatanganan Komitmen Bersama Pembangunan Manajemen Talenta Antara Pejabat Pembina Kepegawaian se-Kalimantan Barat Tahun 2025.

#### **Hasil Kegiatan :**

- Pelaksanaan kegiatan dipimpin oleh Plt Kepala Seksi Kewaspadaan Dini Haryatmin, S.IP.
- Waktu pelaksanaan tanggal 2 Desember 2025 di mulai pukul 08.00 WIB sampai selesai tempat di Pendopo Gubernur Provinsi Kalimantan Barat.

#### **Hasil Temuan di Lapangan**

Kalimantan Barat terus memperkuat langkah dalam membangun birokrasi yang lebih adaptif dan berorientasi kinerja melalui penguatan Manajemen Talenta ASN. Komitmen bersama antara PPK se-Kalbar dan Kepala BKN menjadi pijakan penting untuk memastikan pengelolaan talenta ASN berjalan lebih terarah dan berbasis kebutuhan organisasi. Momentum ini menegaskan keseriusan Pemda se-Kalbar dalam mendorong tata kelola ASN yang lebih modern, kompeten, dan berintegritas.

Dalam arahnya, Prof. Zudan menekankan pentingnya pemetaan potensi, pengembangan kompetensi, dan penempatan ASN

yang didukung data akurat. Manajemen Talenta Nasional disebut sebagai sistem terbaru yang mendorong ASN bergerak lebih cepat dan tepat dalam mencapai target kinerja. Sinergi antara Pemda se-Kalbar dan BKN diharapkan menghasilkan implementasi nyata, melahirkan ASN unggul, serta memperkuat peran birokrasi dalam mewujudkan pembangunan daerah menuju Indonesia Emas 2045.

Pada Kegiatan Gubernur Penguatan Implementasi Manajemen Talenta ASN pada Pemerintah Daerah se-Kalimantan Barat dan Penandatanganan Komitmen Bersama Pembangunan Manajemen Talenta Antara Pejabat Pembina Kepegawaian se-Kalimantan Barat Tahun 2025 tidak ditemukan potensi gangguan trantibum selama kegiatan berlangsung.

4. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Nomor. 300.1/ 1831 /SATPOL.PP-B tanggal 3 Desember 2025, dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 3 Desember 2025 Dalam Rangka Deteksi Dini Antisipasi Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Gubernur Pembukaan Musprov ke-I Pengurus SMSI (Serikat Media Siber Indonesia) Kalimantan Barat dan Seminar Pengusulan RM Margono Djojodikoesoemo Menjadi Pahlawan Nasional Tahun 2025.

**Hasil Kegiatan :**

- Pelaksanaan kegiatan dipimpin oleh Plt Kepala Seksi Kewaspadaan Dini Haryatmin, S.IP.
- Waktu pelaksanaan tanggal 3 Desember 2025 di mulai pukul 08.00 WIB sampai selesai tempat di Pendopo Jalan A Yani I Provinsi Kalimantan Barat.

**Hasil Temuan di Lapangan**

Mengusung tema "Perkuat Peran SMSI dalam Menjaga Kedaulatan Informasi dan Merawat Sejarah Bangsa," forum ini menjadi ruang pertemuan antara pengurus SMSI, akademisi, mahasiswa, dan insan pers dari berbagai daerah. Sejak hari pertama, diskusi berjalan dinamis. Para peserta terlibat aktif dalam tanya jawab, memperlihatkan

antusiasme terhadap isu-isu media digital, sejarah, dan peran jurnalisisme sebagai penjaga ingatan kolektif bangsa.

Sekretaris Jenderal SMSI Pusat, Makali Kumar, menekankan pentingnya peran SMSI dalam menjaga ruang digital tetap sehat dan berimbang. Ia mengajak seluruh anggota SMSI meningkatkan profesionalisme, kemampuan literasi digital, dan komitmen terhadap etika jurnalistik. "SMSI harus menjadi benteng informasi digital. Kita perlu menjadi pelopor media yang kredibel dan bertanggung jawab di tengah derasnya arus informasi," tutur Makali. Kehadiran mahasiswa dari berbagai kampus dan jurnalis dari beragam platform membuat diskusi semakin hidup.

Pertanyaan-pertanyaan kritis mengemuka, mulai dari tantangan regulasi pers hingga upaya pelestarian sejarah melalui pemberitaan yang berkualitas. Melalui Musprov SMSI Kalbar 2025, peserta berharap lahir rekomendasi strategis untuk memperkuat peran SMSI dalam menjaga kedaulatan informasi di era digital. Forum ini juga diharapkan mendorong media siber lebih aktif merawat sejarah bangsa melalui jurnalisisme yang akurat, mendalam, dan berintegritas.

Pada Kegiatan Gubernur Pembukaan Musprov ke-I Pengurus SMSI (Serikat Media Siber Indonesia) Kalimantan Barat dan Seminar Pengusulan RM Margono Djodjodikoesoemo Menjadi Pahlawan Nasional Tahun 2025 tidak ditemukan potensi gangguan trantibum selama kegiatan berlangsung.

5. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Nomor. 300.1/ 1842 /SATPOL.PP-B tanggal 5 Desember 2025, dilaksanakan pada hari Jum'at, tanggal 5 Desember 2025 Dalam Rangka Deteksi Dini Antisipasi Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Acara Pelantikan Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Ansor Kalimantan Barat Masa Khidmah 2025-2029 dengan tema "Meneguhkan Kedaulatan Ansor Kalbar.

### **Hasil Kegiatan :**

- Pelaksanaan kegiatan dipimpin oleh Plt Kepala Seksi Kewaspadaan Dini Haryatmin, S.IP.
- Waktu pelaksanaan tanggal 5 Desember 2025 di mulai pukul 09.00 WIB sampai selesai tempat di Pendopo Jalan A Yani I Provinsi Kalimantan Barat.

### Hasil Temuan di Lapangan

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Pimpinan Pusat (PP) Gerakan Pemuda (GP) Ansor, H. A. Rifqi Al Mubarak, resmi melantik jajaran pengurus Pimpinan Wilayah (PW) GP Ansor Kalimantan Barat masa khidmat 2025-2029. Prosesi pelantikan digelar di Pendopo Gubernur Kalimantan Barat, pada Jum'at 5 Desember 2025, mengusung tema "Meneguhkan Kedaulatan Ansor Kalbar. Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menyampaikan harapannya usai acara pelantikan. Ia menegaskan bahwa kehadiran GP Ansor sebagai organisasi anak muda Islam harus mampu memperkuat pembangunan daerah. Harapan kami kepada PW GP Ansor yang sudah dilantik, semakin solid untuk memajukan Kalimantan Barat. PW GP Ansor harus tetap bersinergi dengan pemerintah daerah, gubernur menambahkan bahwa pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Kolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk GP Ansor, menjadi kunci memperkuat posisi pemerintah daerah dalam mendorong kesejahteraan masyarakat.

Pada Kegiatan Acara Pelantikan Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Ansor Kalimantan Barat Masa Khidmah 2025-2029 dengan tema "Meneguhkan Kedaulatan Ansor Kalbar tidak ditemukan potensi gangguan trantibum selama kegiatan berlangsung.

**C. Melaksanakan Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Linmas Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Pada Kegiatan Kerja Gubernur dan Wagub Kalbar, berdasarkan :**

1. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Nomor. 300.1/ 1613 /SATPOL.PP-B tanggal 30 Oktober 2025, dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 30 Oktober 2025 Dalam Rangka Deteksi Dini Antisipasi Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Borneo Intra Regional Dialog di Pendopo Gubernur Kalimantan Barat.

**Hasil Kegiatan :**

- Pelaksanaan kegiatan dipimpin oleh Plt Kepala Seksi Kewaspadaan Dini Haryatmin, S.IP.
- Melakukan Koordinasi Dengan Semua Tim Satpol PP Pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat.

**Hasil Temuan di Lapangan**

Kegiatan Borneo Intra-Regional Dialogue 2025 dibuka oleh Gubernur Kalimantan Barat. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Kabar Grup Indonesia dan didukung oleh AMSI Kalbar dan HIPMI Kalbar yang diinisiasi untuk memperkuat konektivitas wilayah Borneo sekaligus menempatkan Pontianak sebagai simpul penting Kerjasama Regional;

Kegiatan ini menjadi wadah sinergi antara Pemerintah Daerah dan para pemangku kepentingan dalam mendorong Kerjasama lintas Borneo meliputi Kalimantan, Serawak dan Brunei dengan Pontianak sebagai Pusat Dialog dan pertukaran ide.

Kegiatan berskala Nasional dihadiri oleh sejumlah tokoh penting dan pemangku kepentingan serta beberapa Kepala Daerah dan Pelaku Usaha.

Pada selama berlangsungnya kegiatan Borneo Intra-Regional Dialogue 2025 tersebut tidak ditemukan potensi gangguan trantibum selama kegiatan berlangsung.

2. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Nomor. 300.1/ 1652 /SATPOL.PP-B tanggal 06 November 2025, dilaksanakan pada hari Kamis, 06 November 2025 Dalam Rangka Deteksi Dini Antisipasi Potensi Gangguan Trantibum Kegiatan Dialog Pemuda Lintas Generasi Seribu Pemuda Satu Tekad Membangun Kalbar Dalam Bingkai Kebinekaan di Pendopo Provinsi Kalimantan barat Tahun 2025.

**Hasil Kegiatan :**

- Pelaksanaan kegiatan dipimpin oleh Plt Kepala Seksi Kewaspadaan Dini Haryatmin, S.IP.
- Waktu pelaksanaan tanggal 6 November 2025 di mulai pukul 08.00 WIB sampai selesai tempat di Pendopo Jalan A Yani I Provinsi Kalbar

**Hasil Temuan di Lapangan**

Generasi muda memiliki peran penting dalam menentukan arah kemajuan Kalimantan Barat. Gubernur Ria Norsan menegaskan, masa depan daerah akan maju apabila pemudanya memiliki semangat belajar, berorganisasi, dan terus berkarya untuk membangun Kalbar di tengah keberagaman. Melalui Dialog Pemuda Lintas Generasi yang digelar Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kalbar, semangat "1000 Pemuda, Satu Tekad Membangun Kalbar Dalam Bingkai Bhinneka" menjadi pengingat bahwa keberagaman adalah kekuatan yang menyatukan. Mari jadikan momentum ini sebagai ajang memperkuat persatuan, menumbuhkan semangat kebangsaan, dan berkontribusi nyata demi kemajuan Kalimantan Barat.

3. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Nomor. 300.1/ 1685 /SATPOL.PP-B tanggal 12 November 2025, dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 12 November 2025 Dalam Rangka Deteksi Dini Antisipasi Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Wakil Gubernur Dalam Acara Peresmian Hotel Four Points Di Kubu Raya Dan Kegiatan Sekda Di Gedung Garuda Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025.

### **Hasil Kegiatan :**

- Pelaksanaan kegiatan dipimpin oleh Plt Kepala Seksi Kewaspadaan Dini Haryatmin, S.IP.
- Waktu pelaksanaan tanggal 12 November 2025 di mulai pukul 08.00 WIB sampai selesai tempat di Hotel Four Point di Kabupaten Kubu Raya.

### Hasil Temuan di Lapangan

Wagub Kalbar, Krisantus Kurniawan, menyampaikan bahwa berdirinya hotel berstandar internasional ini menandai meningkatnya kepercayaan investor terhadap potensi besar Kalimantan Barat, sekaligus memperkuat daya tarik daerah di mata wisatawan. Menurutnya, keberadaan hotel berbintang lima seperti Four Points bukan hanya menambah fasilitas akomodasi berkualitas, tetapi juga membuka peluang lapangan kerja baru, mendorong promosi daerah, dan memperkuat ekosistem pariwisata yang berdaya saing. Wagub Krisantus juga mengajak seluruh pihak untuk terus berkolaborasi dalam mengembangkan potensi lokal, meningkatkan kualitas SDM di sektor pariwisata, serta menjadikan Kalbar sebagai destinasi yang maju, ramah, dan berkelas. Pada Kegiatan Gubernur Di Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 tidak ditemukan potensi gangguan trantibum selama kegiatan berlangsung.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus memperkuat tata kelola keuangan daerah melalui kegiatan Sosialisasi Permendagri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026. Dalam arahannya, Sekda Kalbar Harisson, menekankan bahwa tahun 2026 akan menjadi periode penuh tantangan, terutama dengan adanya penurunan alokasi Transfer ke Daerah (TKD). Karena itu, efisiensi anggaran dan penyesuaian program menjadi kunci agar pembangunan daerah tetap berjalan optimal. Beliau juga mendorong seluruh perangkat daerah untuk memperkuat sinergi dan menyusun APBD 2026 yang sejalan dengan visi dan misi kepala daerah, sehingga setiap kebijakan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat Kalbar.

4. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Nomor. 300.1/ 1690 /SATPOL.PP-B tanggal 13 November 2025, dilaksanakan pada hari Kamis, 13 November 2025 Dalam Rangka Deteksi Dini Antisipasi Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Kerja Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat.

**Hasil Kegiatan :**

- Pelaksanaan kegiatan dipimpin oleh Plt Kepala Seksi Kewaspadaan Dini Haryatmin, S.IP.
- Waktu pelaksanaan tanggal 13 November 2025 di mulai pukul 08.00 WIB sampai selesai.

**Hasil Temuan di Lapangan**

Membentuk tim yang terdiri dari Dinas LHK Provinsi Kalbar, Dinas LH Kabupaten Mempawah, Perwakilan warga, Komisi 2 DPRD Mempawah, Perusahaan, Tim Appraisal, Biro hukum Pemprov Kalbar, Saya berharap ini selesai cepat, warga tak menunggu lama, inventarisasi lahan mana saja yang harus diganti rugi perusahaan, Senin mulai bekerja," kata Wagub Kalbar, Krisantus Kurniawan Memimpin Rapat Pembahasan Lanjutan Penyelesaian Lahan Terkait Dampak Akibat dari Limbah Industri PT. Energi Unggul Persada (PT. EUP) di Daerah Pemukiman sekitar di Pontianak. Hadir dalam rapat tersebut Warga masyarakat Desa Sungai Limau Kecamatan Sungai Kunyit, Perwakilan PT. EUP, Kepala Dinas LHK Provinsi Kalbar, Komisi II DPRD Mempawah, Dinas LH Kabupaten Mempawah dan instansi terkait lainnya. Sebelumnya dalam rapat tersebut terjadi perbedaan peta lahan yang terdampak limbah industri yang mesti di bebaskan atau ganti rugi antara warga dengan pihak perusahaan, maka agar tidak berlarut Wakil Gubernur mengambil keputusan membentuk tim yang bisa bekerja

Sekda Kalbar Harisson menyampaikan bahwa dinamika administrasi yang melibatkan Kepala Daerah dan DPRD kini semakin beragam, sehingga dibutuhkan ketelitian serta kesamaan persepsi dalam setiap pengambilan keputusan. Kegiatan ini juga mendorong perangkat daerah untuk terus memperbarui pemahaman aturan dan meningkatkan kapasitas aparatur, sehingga setiap langkah administratif

memiliki kepastian hukum dan meminimalkan potensi kekeliruan. Dengan kolaborasi dan kepatuhan pada regulasi, tata kelola pemerintahan di Kalimantan Barat diharapkan semakin solid dan responsif terhadap kebutuhan daerah.

5. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Nomor. 300.1/ 1755 /SATPOL.PP-B tanggal 21 November 2025, dilaksanakan pada hari Sabtu, 22 November 2025 Dalam Rangka Deteksi Dini Antisipasi Potensi Gangguan Trantibum Pada Acara Komite Kabupaten Sambas (KMKS) Dan Galadinner Kalimantan Internasional MTB Vestifal KIMF Di Pendopo Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025.

**Hasil Kegiatan :**

- Pelaksanaan kegiatan dipimpin oleh Plt Kepala Seksi Kewaspadaan Dini Haryatmin, S.IP.
- Waktu pelaksanaan tanggal 22 November 2025 di mulai pukul 09.00 WIB sampai selesai bertempat di Pendopo Gubernur Provinsi Kalimantan Barat.

**Hasil Temuan di Lapangan**

Gubernur Ria Norsan mengajak seluruh mahasiswa menjaga kekompakan, memperkuat jejaring, dan mempersiapkan diri sebagai generasi yang mampu membawa nama Sambas semakin maju. Beliau juga mengingatkan kembali sejarah kejayaan Sambas sebagai daerah religius yang banyak melahirkan tokoh berpengaruh. Semangat itu, katanya, harus terus dirawat oleh generasi muda agar Sambas tetap menjadi daerah yang diperhitungkan, baik di tingkat regional maupun nasional. Melalui silaturahmi ini, mahasiswa diharapkan semakin solid, semakin percaya diri, dan semakin siap memberikan kontribusi nyata bagi masa depan Kabupaten Sambas.

Sebagai tuan rumah, Pemprov Kalbar menegaskan bahwa KIMF bukan sekadar kompetisi, tetapi bagian dari upaya memperkuat sport tourism dan memperkenalkan Kalbar sebagai destinasi olahraga berkelas dunia.

6. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Nomor. 300.1/ 1756 /SATPOL.PP-B tanggal 21 November 2025, dilaksanakan pada hari Minggu, 23 November 2025 Dalam Rangka Deteksi Dini Antisipasi Potensi Gangguan Trantibum Pada Acara Peluncuran Program MikroDOTS 2025 oleh Menteri UMKM di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025.

**Hasil Kegiatan :**

- Pelaksanaan kegiatan dipimpin oleh Plt Kepala Seksi Kewaspadaan Dini Haryatmin, S.IP.
- Waktu pelaksanaan tanggal 23 November 2025 di mulai pukul 06.00 WIB sampai selesai bertempat Area Car Free Day Jalan Ahmad Yani Provinsi Kalimantan Barat.

**Hasil Temuan di Lapangan**

Mikro DOTS 2025 untuk pertama kalinya digelar di Kalimantan Barat melalui rangkaian Car Free Day Pontianak. Program ini menjadi tindak lanjut dari Festival Kemudahan dan Perlindungan Usaha Mikro serta menegaskan Pontianak sebagai daerah percontohan nasional dalam pengembangan layanan pendampingan UMKM berbasis masyarakat.

Mikro DOTS dirancang untuk menghadirkan layanan yang lebih ramah, mudah diakses, dan dekat dengan pelaku UMKM, mulai dari percepatan sertifikasi halal dan legalitas usaha, edukasi pemasaran digital, hingga akses pembiayaan. Selain itu, kolaborasi lintas sektor juga diperkuat untuk menciptakan ekosistem UMKM yang lebih solid. Program ini diharapkan mampu membuka ruang pertumbuhan baru bagi pelaku UMKM Kalbar, sekaligus memotivasi mereka untuk terus berusaha, tidak mudah menyerah, dan berani naik kelas.

7. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Nomor. 300.1/ 1763 /SATPOL.PP-B tanggal 24 November 2025, dilaksanakan pada hari Senin, 24 November 2025 Dalam Rangka Deteksi Dini Antisipasi Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Gubernur Dalam Acara Dalam Konferensi Daerah dan Konferensi

Cabang PDI Perjuangan se-Kalimantan Barat di Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025.

**Hasil Kegiatan :**

- Pelaksanaan kegiatan dipimpin oleh Plt Kepala Seksi Kewaspadaan Dini Haryatmin, S.IP.
- Waktu pelaksanaan tanggal 24 November 2025 di mulai pukul 14.00 WIB sampai selesai bertempat di Ballroom Qubu Resort Kabupaten Kubu Raya.

Hasil Temuan di Lapangan

Dalam Konferensi Daerah dan Konferensi Cabang PDI Perjuangan se-Kalimantan Barat, Gubernur Ria Norsan turut hadir bersama Wakil Gubernur Krisantus Kurniawan yang juga merupakan kader PDI Perjuangan. Keduanya memberikan dukungan penuh terhadap penguatan organisasi dan konsolidasi partai.

Gubernur menegaskan pentingnya peran partai politik dalam menjaga stabilitas demokrasi serta mendorong pembangunan daerah. Ia menyampaikan bahwa kemajuan Kalbar membutuhkan dukungan seluruh elemen politik, terutama dalam menjaga iklim yang kondusif dan menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas. Pada kesempatan tersebut, Gubernur juga mengapresiasi PDI Perjuangan atas kontribusinya dalam menjaga stabilitas demokrasi serta masukan konstruktif bagi pemerintah daerah. Ia kembali menyampaikan terima kasih kepada PDI Perjuangan yang telah mengusung dirinya sebagai Gubernur Kalimantan Barat, sebuah kehormatan yang terus ia ingat dan syukuri.

8. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Nomor. 300.1/ 1764 /SATPOL.PP-B tanggal 24 November 2025, dilaksanakan pada hari Selasa, 25 November 2025 Dalam Rangka Deteksi Dini Antisipasi Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Gubernur Dalam Acara Gema Membangun Desa Di Kantor Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalbar Tahun 2025.

### **Hasil Kegiatan :**

- Pelaksanaan kegiatan dipimpin oleh Plt Kepala Seksi Kewaspadaan Dini Haryatmin, S.IP.
- Waktu pelaksanaan tanggal 25 November 2025 di mulai pukul -06.30 WIB sampai selesai bertempat di Halaman Kantor Desa Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya.

### Hasil Temuan di Lapangan

Gubernur Kalbar, Ria Norsan, menegaskan bahwa pembangunan efektif harus berangkat dari desa, dengan kehadiran pemerintah yang benar-benar berada di tengah masyarakat untuk memahami kebutuhan secara langsung. Melalui konsep bermalam di desa, jajaran Pemprov akan berada 2-3 hari bersama warga, membawa berbagai layanan terpadu seperti pembuatan KTP, SIM, paspor, hingga pendidikan nonformal dan reaktivasi posyandu. Peluncuran perdana di Sungai Kakap juga diisi penyaluran lebih dari seribu paket sembako bersubsidi sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap masyarakat.

Gema Membangun Desa menjadi komitmen untuk menjangkau seluruh desa di Kalbar dan memastikan pembangunan yang lebih inklusif serta dekat dengan warga.

9. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Nomor. 300.1/ 1832 /SATPOL.PP-B tanggal 4 Desember 2025, dilaksanakan pada hari Kamis, 4 Desember 2025 Dalam Rangka Deteksi Dini Situasi dan Kondisi yang Berpotensi Rawan Gangguan Trantibum Pada Acara MoU Antara Kejaksaan Tinggi dengan Gubernur Kalimantan Barat serta PKS Kajari dengan Walikota/Bupati se-Kalbar dan Kegiatan Peresmian Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan se-Kalbar Tahun 2025

### **Hasil Kegiatan :**

- Pelaksanaan kegiatan dipimpin oleh Plt Kepala Seksi Kewaspadaan Dini Haryatmin, S.IP.

- Waktu pelaksanaan tanggal 4 Desember 2025 di mulai pukul 08.00 WIB sampai selesai tempat di Pendopo dan Kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Barat.

#### Hasil Temuan di Lapangan

Gubernur Kalbar, Ria Norsan, menegaskan, kerja sama ini bukan sekadar penandatanganan dokumen, tetapi komitmen nyata untuk menghadirkan sistem pemidanaan yang lebih bermartabat, melalui standar operasional yang jelas, pengawasan yang kuat, serta kegiatan pembinaan yang membawa manfaat sosial.

MoU ini juga membuka jalan bagi penerapan pidana kerja sosial, sebagai alternatif pemidanaan yang lebih humanis dan memberi kesempatan bagi pelaku untuk kembali berkontribusi kepada masyarakat. Sinergi Pemda dan Kejaksaan diharapkan bisa menjadikan Kalimantan Barat sebagai model nasional dalam implementasi paradigma pemidanaan baru yang tegas namun tetap mengedepankan pemulihan.

Akses bantuan hukum di Kalimantan Barat kini semakin dekat dengan hadirnya 2.145 Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan yang tersebar hingga ke pelosok. Langkah ini menjadi terobosan penting untuk memastikan masyarakat mendapatkan layanan hukum yang mudah, gratis, dan terjangkau. Gubernur Kalbar, Ria Norsan, menegaskan bahwa Posbakum akan menjadi pondasi kuat bagi terwujudnya keadilan yang benar-benar dirasakan masyarakat, sekaligus membantu mengurangi persoalan hukum yang kerap menjerat perangkat desa akibat kurangnya pendampingan. Hadirnya Posbakum ini juga diperkuat oleh peran paralegal desa sebagai garda depan advokasi hukum, memberikan konsultasi, edukasi, mediasi non-litigasi, hingga menjadi juru damai di tengah masyarakat.

**D. Melaksanakan Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Linmas Dalam Rangka Deteksi Dini Terkait Tugas Pokok dan Fungsi Seksi Kewaspadaan Dini, berdasarkan :**

1. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Nomor. 300.1/ 1571 /SATPOL.PP-B tanggal 23 Oktober 2025, dilaksanakan pada hari Senin, 27 Oktober 2025 Dalam Rangka Deteksi Dini Situasi dan Kondisi yang Berpotensi Rawan Gangguan Trantibum Kegiatan Koordinasi di Kantor Satpol PP Mempawah Tentang Kenakalan Remaja Dan Anak - Anak Nongkrong Pada Jam Malam di lingkungan Kabupaten Mempawah Provinsi Kalbar Tahun 2025.

**Hasil Kegiatan :**

- Pelaksanaan kegiatan dipimpin oleh Plt Kepala Seksi Kewaspadaan Dini Haryatmin, S.IP.
- Melakukan Kordinasi Terkait Data Trantibum dan Kenakalan Remaja Dengan Satpol PP Kab. Mempawah.

**Hasil Temuan di Lapangan**

Pada hari kamis tanggal 27 Oktober 2025 anggota tim Satpol PP Provinsi Kalbar melakukan koordinasi untuk melakukan razia para remaja yang sering nongkrong di jalan-jalan ,trotoar ,gang ,maupun di caffee-caffee yang berada di kabupaten mempawah Kalimantan Barat untuk menciptakan ketertiban dan keamanan daerah tersebut. Pak Eryanto sebagai PLT Kabid Binmas menyambut baik akan rencana melakukan penyelenggaraan ketertiban umum dan perlindungan Masyarakat di daerah kabupaten mempawah akan mendukung sepenuhnya rencana sosialisasi perda no 4 tahun 2021

Tindak Lanjut Dari Koordinasi sebelumnya Ada Beberapa Titik trotoar Yang Menjadi Atensi Pemasangan Plang Himbauan Dilarang Parkir,Berjualan ,Main Sepeda Listrik Di Atas Trotoar Yang Ada Di Kabupaten Mempawah Berkat Arahan Dari Plt Kabit Binmas Kabupaten Mempawah. Kegiatan Koordinasi di Kantor Satpol PP Mempawah Tentang Kenakalan Remaja Dan Anak-Anak Nongkrong Pada Jam Malam di lingkungan Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025.

2. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Nomor. 300.1/ 1622 /SATPOL.PP-B tanggal 31 Oktober 2025, dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 03 November 2025 Dalam Rangka Deteksi Dini Situasi dan Kondisi yang Berpotensi Rawan Gangguan Trantibum dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Mempawah Provinsi Kalbar Tahun 2025.

**Hasil Kegiatan :**

- Pelaksanaan kegiatan dipimpin oleh Plt Kepala Seksi Kewaspadaan Dini Haryatmin, S.IP.
- Waktu pelaksanaan tanggal 1 November 2025 di mulai pukul 08.00 WIB sampai selesai bertempat di Kantor Satpol PP Kabupaten Mempawah.

Hasil Temuan di Lapangan

Tim melakukan koordinasi dengan Satpol PP Kabupaten Mempawah dan diterima oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mempawah dan didampingi oleh Plt. Kepala Bidang Penegakan.

Koordinasi dilakukan terkait dengan tindaklanjut rencana pemasangan plang himbauan Larangan Berjualan dan Larangan Parkir di Trotoar. Plang Himbauan belum dapat direalisasikan dikarenakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mempawah masih melakukan pemetaan lokasi yang akan dipasang Plang Himbauan tersebut.

Disamping itu, koordinasi juga dilakukan terkait situasi dan kondisi di Kabupaten Mempawah yang dapat menimbulkan potensi gangguan Trantibum dan linmas. Beberapa kali adanya aksi unjuk rasa di Halaman Kantor Bupati Kubu Raya namun secara umum situasi dan kondisi di Kabupaten Mempawah kondusif. Data Potensi Gangguan Trantibum dan Linmas akan diserahkan ke Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat sebagai bahan tindak lanjut.

3. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Nomor. 300.1/ 1727 /SATPOL.PP-B tanggal 18 November 2025, dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 18 November 2025 Dalam Rangka Deteksi Dini Antisipasi Potensi Gangguan Trantibum pada Kegiatan Rapat Koordinasi Dan Pemantauan Tindak Lanjut Penertiban Barang Milik Daerah Provinsi Kalimantan Barat di Kantor Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat.

**Hasil Kegiatan :**

- Pelaksanaan kegiatan dipimpin oleh Plt Kepala Seksi Kewaspadaan Dini Haryatmin, S.IP.
- Waktu pelaksanaan tanggal 18 November 2025 di mulai pukul 09.00 WIB sampai selesai bertempat di Kantor Pertanahan Provinsi Kalimantan Barat.

**Hasil Temuan di Lapangan**

Melalui kegiatan koordinasi bersama KPK RI, ATR/BPN, dan perwakilan kabupaten/kota, Sekda Harisson menegaskan pentingnya integritas, sinergi, dan keberanian dalam menata aset demi pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Pemprov Kalbar juga telah menindaklanjuti berbagai arahan KPK RI, mulai dari penyusunan kategorisasi aset, pengajuan sertipikat, pengukuran lapangan, hingga pembentukan Tim Terpadu. Upaya pembenahan PSU pun diperkuat agar pengelolaan aset daerah semakin akuntabel dan terhindar dari potensi kerugian. Sekda menekankan bahwa penataan aset bukan hanya soal administrasi, tetapi komitmen moral untuk berubah demi kemajuan daerah.

Pada Kegiatan Rapat Koordinasi Dan Pemantauan Tindak Lanjut Penertiban Barang Milik Daerah Provinsi Kalimantan Barat di Kantor Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat tidak ditemukan potensi gangguan trantibum selama kegiatan berlangsung.

## 2.2 Realisasi Keuangan

Realisasi Keuangan Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi pada Triwulan IV Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut :

### REALISASI KEUANGAN TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2025

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	% CAPAIAN KINERJA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6
<b>Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi				
	Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Input : Dana Output : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	287.972.900,-	284.564.926,-	98,81 %

Sumber data : SIPD

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa anggaran kegiatan Tahun 2025 sebesar Rp. 287.972.900,- (dua ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) dan pada Triwulan IV telah direalisasikan sebesar Rp. 284.564.926,- (dua ratus delapan puluh empat juta lima ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah) atau sebesar 98,81 %. Hal ini menunjukkan tingkat realisasi anggaran sesuai dengan dalam dokumen perencanaan yang telah ditetapkan (anggaran kas).

**BAB III**  
**HASIL DAN KENDALA PELAKSANAAN KEGIATAN**

**3.1 Hasil Pelaksanaan Kegiatan**

Hasil pelaksanaan kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi Triwulan IV Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

**HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN TRIWULAN IV TAHUN 2025**

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	% CAPAIAN KINERJA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6
<b>Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi				
	Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Input : Dana Output : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	4 Laporan	4 Laporan	100 %

Pada tabel diatas dapat terlihat bahwa target kegiatan pada Triwulan IV Tahun Anggaran 2025 yaitu jumlah laporan hasil pelaksanaan kegiatan Koordinasi sebanyak 4 (empat) laporan atau sebanyak 100 % (seratus) persen.

Hal ini menunjukkan tingkat capaian kinerja yang efektif sesuai dengan bahkan melebihi yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan yang telah ditetapkan.

### 3.2 Kendala dan Solusi

- a. Kendala yang dihadapi pada saat pelaksanaan kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi yaitu belum optimal koordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat untuk memperoleh data dan informasi peta potensi rawan konflik yang dapat mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum di Kalimantan Barat.
- b. Solusi untuk mengatasi kendala yang dihadapi yaitu melakukan rapat koordinasi secara berkala dan berkesinambungan dengan instansi terkait terkait baik pusat maupun provinsi dan kabupaten/kota se-Kalimantan Barat, *stakeholder* maupun dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat.

## **BAB IV PENUTUP**

Laporan pelaksanaan kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi Triwulan IV Tahun Anggaran 2025 sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Triwulan IV Tahun Anggaran 2025, yang memuat hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Demikian Laporan Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan Triwulan IV Tahun Anggaran 2025. Selanjutnya laporan kegiatan ini dapat dijadikan bahan/data untuk tindak lanjut penyusunan Laporan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Triwulan IV Tahun Anggaran 2025.

Pontianak, 1 Desember 2025

**Mengetahui:**

**Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat,**

  
**EKA WINDASARI, S.E., M.M.**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19820814 200604 2 009

**Plt. Kepala Seksi Kewaspadaan Dini,**

  
**HARYATMIN, S.IP**  
Penata Tk. I  
NIP. 19761005 199803 1 008

## LAMPIRAN

### A. DOKUMENTASI KEGIATAN



## B. SURAT PERINTAH TUGAS

NO	SPT	HARI/ WAKTU	GIAT	PERSONIL			LOKASI
1	No. 300.1/ 1444 /SATPOL.PP-B Tanggal 3 Oktober 2025	Jum'at, 3 Oktober 2025	Melaksanakan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Aksi Unjuk Rasa Badan Koordinasi HMI Kalbar di Tugu Digulis Pontianak.	SATPOL PP	6	Orang	Kota Pontianak
2	No. 300.1/ 1441 /SATPOL.PP-B Tanggal 3 Oktober 2025	Senin, 6 Oktober 2025	Melaksanakan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Maulid Akbar di Masjid An – Na'im Kantor Gubernur Kalimantan Barat.	SATPOL PP	8	Orang	Kota Pontianak
3	No. 300.1/ 1456 /SATPOL.PP-B Tanggal 7 Oktober 2025	Selasa, 7 Oktober 2025	Melaksanakan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Aksi Unjuk Rasa Aliansi Organda Kalbar 14 Kabupaten Kota di Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Barat.	SATPOL PP	8	Orang	Kota Pontianak

4	No. 300.1/ 1504 /SATPOL.PP-B Tanggal 14 Oktober 2025	Rabu, 15 Oktober 2025	Melaksanakan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Aksi Unjuk Rasa di Kantor Kejati Kalimantan Barat.	SATPOL PP	8	Orang	Kota Pontianak
5	No. 300.1/ 1511 /SATPOL.PP-B Tanggal 15 Oktober 2025	Kamis, 16 Oktober 2025	Melaksanakan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Aksi Unjuk Rasa di Kantor Gubernur Kalimantan Barat.	SATPOL PP	10	Orang	Kubu Raya
6	No. 300.1/ 1526 /SATPOL.PP-B Tanggal 17 Oktober 2025	Jum'at, 17 Oktober 2025	Melaksanakan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Aksi Unjuk Rasa BEM SI di Kantor Gubernur Kalimantan Barat.	SATPOL PP	8	Orang	Kota Pontianak
7	No. 300.1/ 1571 /SATPOL.PP-B Tanggal 23 Oktober 2025	Senin, 27 Oktober 2025	Melaksanakan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum di	SATPOL PP	4	Orang	Kab Mempawah

			Kabupaten Mempawah				
8	No. 300.1/ 1613 /SATPOL.PP-B Tanggal 30 Oktober 2025	Kamis, 30 Oktober 2025	Melaksanakan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Borneo Intra Regional Dialog di Pendopo Gubernur Kalimantan Barat.	SATPOL PP	6	Orang	Kota Pontianak
9	No. 300.1/ 1622 /SATPOL.PP-B Tanggal 31 Oktober 2025	Senin, 3 November 2025	Melaksanakan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum di Kabupaten Mempawah	SATPOL PP	4	Orang	Kab Mempawah
10	No. 300.1/ 1652 /SATPOL.PP-B Tanggal 06 November 2025	Kamis, 6 November 2025	Melaksanakan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Di Pendopo Gubernur Kalbar	SATPOL PP	6	Orang	Kota Pontianak
11	No. 300.1/ 1663 /SATPOL.PP-B Tanggal 07 November 2025	Jum'at, 7 November 2025	Melaksanakan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan	SATPOL PP	7	Orang	Kota Pontianak

			Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Di Kota Pontianak				
12	No. 300.1/ 1685 /SATPOL.PP-B Tanggal 12 November 2025	Rabu, 12 November 2025	Melaksanakan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Di Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya	SATPOL PP	7	Orang	Kab Kubu Raya
13	No. 300.1/ 1690 /SATPOL.PP-B Tanggal 13 November 2025	Kamis, 13 November 2025	Melaksanakan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Di Kota Pontianak	SATPOL PP	7	Orang	Kota Pontianak
14	No. 300.1/ 1697 /SATPOL.PP-B Tanggal 14 November 2025	Jum'at, 14 November 2025	Melaksanakan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Keterbukaan Informasi Publik Kalbar Tahun 2025	SATPOL PP	6	Orang	Kota Pontianak
15	No. 300.1/ 1699 /SATPOL.PP-B Tanggal 14 November 2025	Minggu, 16 November 2025	Melaksanakan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan	SATPOL PP	14	Orang	Kota Pontianak

			Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Di Kota Pontianak				
16	No. 300.1/ 1727 /SATPOL.PP-B Tanggal 18 November 2025	Selasa, 18 November 2025	Melaksanakan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Di Kota Pontianak	SATPOL PP	7	Orang	Kota Pontianak
17	No. 300.1/ 1734 /SATPOL.PP-B Tanggal 19 November 2025	Rabu, 19 November 2025	Melaksanakan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Aksi Unjuk Rasa di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat.	SATPOL PP	7	Orang	Kota Pontianak
18	No. 300.1/ 1735 /SATPOL.PP-B Tanggal 19 November 2025	Kamis, 20 November 2025	Melaksanakan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Aksi Demonstrasi “Kalbar Menggugat” di DPRD Provinsi Kalimantan Barat.	SATPOL PP	9	Orang	Kota Pontianak
19	No. 300.1/ 1751 /SATPOL.PP-B Tanggal 21 November 2025	Jumat, 21 November 2025	Melaksanakan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan	SATPOL PP	10	Orang	Kota Pontianak

			Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Aksi Demonstrasi “Kalbar Menggugat” di DPRD Provinsi Kalimantan Barat.				
20	No. 300.1/ 1755 /SATPOL.PP-B Tanggal 21 November 2025	Sabtu, 22 November 2025	Melaksanakan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum di Kota Pontianak.	SATPOL PP	8	Orang	Kota Pontianak
21	No. 300.1/ 1756 /SATPOL.PP-B Tanggal 21 November 2025	Minggu, 23 November 2025	Melaksanakan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Acara Mikrodots Sunday 2025 di Kota Pontianak.	SATPOL PP	14	Orang	Kota Pontianak
22	No. 300.1/ 1763 /SATPOL.PP-B Tanggal 24 November 2025	Senin, 24 November 2025	Melaksanakan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum di Kabupaten Kubu Raya.	SATPOL PP	11	Orang	Kabupaten Kubu Raya
23	No. 300.1/ 1764 /SATPOL.PP-B Tanggal 24 November 2025	Selasa, 25 November 2025	Melaksanakan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum	SATPOL PP	15	Orang	Kabupaten Kubu Raya

			dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Acara Gema Membangun Desa Tahun 2025 di Kantor Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya.				
24	No. 300.1/ 1779 /SATPOL.PP-B Tanggal 26 November 2025	Rabu, 26 November 2025	Melaksanakan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Aksi Demonstrasi “Kalbar Menggugat” di DPRD Provinsi Kalimantan Barat.	SATPOL PP	10	Orang	Kota Pontianak
25	No. 300.1/ 1790 /SATPOL.PP-B Tanggal 27 November 2025	Kamis, 27 November 2025	Melaksanakan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum di Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya.	SATPOL PP	10	Orang	Kabupaten Kubu Raya
26	No. 300.1/ 1819 /SATPOL.PP-B Tanggal 2 Desember 2025	Selasa, 2 Desember 2025	Melaksanakan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada	SATPOL PP	10	Orang	Kota Pontianak

			Acara Badan Kepegawaian Negara di Pendopo Gubernur Kalimantan Barat.				
27	No. 300.1/ 1831 /SATPOL.PP-B Tanggal 3 Desember 2025	Rabu, 3 Desember 2025	Melaksanakan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Gubernur Kalimantan Barat di Pendopo Gubernur Kalimantan Barat.	SATPOL PP	9	Orang	Kota Pontianak
28	No. 300.1/ 1832 /SATPOL.PP-B Tanggal 4 Desember 2025	Kamis, 4 Desember 2025	Melaksanakan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Gubernur Kalimantan Barat di Kota Pontianak.	SATPOL PP	12	Orang	Kota Pontianak
29	No. 300.1/ 1842 /SATPOL.PP-B Tanggal 5 Desember 2025	Jumat, 5 Desember 2025	Melaksanakan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Gubernur Kalimantan Barat di Kota Pontianak.	SATPOL PP	8	Orang	Kota Pontianak

